

KONSEP SELF-INTEREST DAN MASLAHAH DALAM RASIONALITAS EKONOMI ISLAM

*Dede Nurohman**

Abstract: *Two important concepts in economics represent the main ideas that this paper is concerned with, namely the concept of self-interest and maslahah. These two concepts will be analyzed in the light of what is commonly known as the economic rationality. The rational dimension of economy is about the individual act in consumption and production. An act in consumption and production –like in any other acts- is called rational as long as it is line with one's logic. When an act is done not in a proper concordance with logic, then the act is not rational. Pure Capitalism in which one would justify his/her acts of oppressing others economically for example, cannot be called rational because it is not logical and is not in a proper consonance with the ethical values. We argue therefore that the rational dimension coupled with its ethical apparatus must represent the heart of all economic activities if a healthy economic foundation is to be established. Here we contend that self-interest –as opposed to maslahah- has no place whatsoever in the whole schemata of rational economy. On the contrary, maslahah is an alternative for the already hegemonic system of global economy in which self-interest is its core. Maslahah is to do with society-interest and not self-interest. At the end, this paper is a critique against the global capitalistic economy that has failed to establish justice and equality for all.*

Keywords: *economic rationality, self-interest, maslahah*

Pendahuluan

Secara naluriyah, semua manusia menginginkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Beberapa cara, dari mulai yang ideal sampai yang pragmatis, mereka tempuh untuk mencapai tujuan itu. Walaupun mereka memiliki cita-cita hidup yang sama, tetapi cara mereka mewujudkannya seringkali berbeda. Bahkan tidak jarang saling berlawanan. Dalam konteks jenis pencarian ekonomi, misalnya, para pedagang merasa bahagia dengan pekerjaannya. Bagi petani, pedagang merupakan jenis pekerjaan yang melelahkan. Berbeda dengan bertani, dapat dikerjakan dengan santai, tidak dikejar target, dan pada saatnya tinggal menunggu panen. Berbeda lagi dengan para guru yang menganggap pekerjaannya lebih mulia dan “mencerdaskan”. Dan banyak lagi cara-cara lain yang dijalani manusia. Namun semuanya satu dalam tujuan, yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.

Dalam konteks yang lebih implisit, cara manusia mencapai kesejahteraan itu tidak jarang sangat bertentangan dengan cara manusia lainnya. Sesuatu yang menurutnya baik dan menguntungkan belum tentu baik dan menguntungkan bagi orang lain. Sesuatu yang rasional belum tentu dapat diterima akal orang lain. Sebagai misal, seorang pedagang memberikan bandrol sangat tinggi bagi sebuah produk. Bagi penjual, hal tersebut wajar dan masuk akal, tetapi belum tentu bagi pembeli atau penjual lainnya. Di sisi lain, terdapat pula seorang pelaku usaha yang merasa puas atas apa yang dilakukannya ketika ia menetapkan harga secukupnya kepada konsumen. Baginya, itu rasional, tetapi bagi kebanyakan orang bisa dianggap sebagai tidak rasional. Ini terjadi dalam kehidupan manusia, khususnya dalam perilaku mereka untuk memenuhi kebutuhan akan kesejahteraannya.

Konsep dan standar rasional tiap individu dalam ekonomi berbeda-beda.

* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung, Jawa Timur.

Memberlakukannya, oleh karena itu, dapat menimbulkan ketegangan sosial. Karena rasionalitas ekonomi seseorang diukur melalui *self-interest* bukannya *maslahah-interest*. Tulisan ini ingin mengalamatkan kajiannya pada pentingnya *maslahah* dalam aktivitas ekonomi sebagai model rasionalitas ekonomi Islam. Untuk itu, tulisan ini diawali pembahasan dengan konsep rasionalitas ekonomi sekuler, sketsa historisnya, dan problem pemberlakuannya. Kemudian kajian diteruskan dengan pentingnya *maslahah* sebagai orientasi ekonomi Islam.

Konsep Rasionalitas Ekonomi

Pemahaman tentang rasionalitas¹ ekonomi tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pengertian ilmu ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi didefinisikan secara beragam, paling populer di antaranya adalah “ilmu yang mempelajari segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang.” Definisi ini dianggap masih kurang representatif sehingga para ahli ekonomi neo-klasik, seperti Lionel Robbins, mengajukan pengertian lain bahwa inti kegiatan ekonomi adalah aspek “pilihan dalam penggunaan sumberdaya.” Dalam pemilihan ini, lanjutnya, manusia menjumpai masalah kelangkaan (*scarcity*). Dengan demikian, sasaran ilmu ekonomi adalah bagaimana mengatasi kelangkaan itu. Dari situ muncul definisi ilmu ekonomi yang dipegang hingga kini, yaitu “sebuah kajian tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan-tujuan dan alat-alat pemuas yang terbatas, yang mengundang pilihan dalam penggunaannya”.²

Ada beberapa titik tekan dari pengertian di atas, perilaku manusia, pilihan dan alat pemuas yang terbatas. Unsur “perilaku manusia” muncul sebagai bagian dari aplikasi naluriyah manusia untuk mencari kesejahteraan hidup. Sehingga itu harus diwujudkan melalui aktivitas. Perilaku ini tentu merupakan cerminan dari apa yang ada dalam diri pelakunya, yang berupa kepercayaan, kecenderungan berpikir, tata nilai, pola pikir dan juga ideologi. Term “pilihan” merupakan hal yang wajar pula, sebab manusia punya rasa, idealisme, dan kecenderungan-kecenderungan serta ukuran-ukuran tertentu yang menjadi standar dalam membentuk hidupnya. Pilihan ini juga tergantung pada yang ada di balik pelakunya. Sedangkan term “alat pemuas yang terbatas” atau kelangkaan sumberdaya, mengandung makna ambigu, bisa ya bisa tidak. *Relativity is an attribute of scarcity*, menurut Zubair Hasan.³ Namun dalam konteks bahwa tujuan manusia mencari kekayaan, term tersebut dapat menjadi spirit untuk mendorong manusia mencapai kekayaan dengan secepatnya. Pendek kata term terakhir ini, mengimplikasikan adanya target tertentu yang harus dikejar pelaku ekonomi.

Dalam bangunan terminologi di atas, konsep rasionalitas ekonomi itu muncul. Setiap orang yang dapat mencari kesejahteraan hidupnya (kekayaan material) dengan cara melakukan pilihan-pilihan yang tepat bagi dirinya, dengan prinsip jangan sampai dia tidak kebagian mendapatkan pilihan itu karena terbatasnya ketersediaan, maka orang tersebut dianggap melakukan tindakan rasional. Dalam lingkup yang lebih khusus, seorang produsen

¹Term rasionalitas diambil dari bahasa Inggris *rationality*. Dalam kamus *Oxford* disebutkan banyak arti *rational*; dapat menggunakan kekuatannya untuk berpikir, tidak bodoh dan ngawur, ungkapan jelas, mudah dipahami. Dan term *rationality* merupakan kata bendanya, yang berarti; kualitas perbuatan berpikir atau sesuatu yang dapat diterima akal. Lihat AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, edisi IV (Inggris: Oxford University Press, 1989), 1040.

²Diambil dari M. Dawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Yogyakarta: LSAF, 1999), 5-7.

³Zubair Hasan, *Introduction to Microeconomics, An Islamic Perspective* (Malaysia: Prentice Hall, 2006), 1.

dianggap rasional jika ia dapat mencapai tujuan usahanya (keuntungan) dengan cara melakukan beberapa pilihan strategi, meminimalisasi kapital dan mendapatkan keuntungan maksimum. Demikian juga konsumen, ia dianggap rasional, jika ia dapat memenuhi atau melampaui batas maksimum kepuasannya dari alat-alat pemuas yang terbatas. Oleh karena itu, rasionalitas ekonomi dapat dipahami sebagai tindakan atas dasar kepentingan pribadi (*self-interest*) untuk mencapai kepuasannya yang bersifat material lantaran khawatir tidak mendapatkan kepuasan itu karena terbatasnya alat atau sumber pemuas.

Jadi, sesungguhnya konsep rasionalitas ini menjadi fondasi penting bagi suatu standar perilaku ekonomi konsep ini menjadi prinsip pembangun suatu ilmu ekonomi. Prinsip ini dijadikan parameter suatu tindakan tepat atau tidak tepat dalam kacamata ekonomi. Jika suatu tindakan ekonomi sesuai dengan parameter tersebut berarti tindakan itu benar, demikian juga sebaliknya. Sebagai misal, jika seseorang lebih memilih membeli mobil Mercy daripada Honda Jazz, maka perilaku orang itu dianggap rasional. Dianggap rasional karena mobil yang pertama lebih mahal dari kedua. Sesuatu yang lebih mahal pasti lebih enak. Dengan itu, maka kepuasan yang paling tinggi terkandung dalam barang yang pertama daripada yang kedua. Apabila ia memilih barang yang kedua, maka ia berarti telah melakukan tindakan tidak rasional. Perilaku seorang untuk mengoptimalkan kepuasan tersebut merupakan perilaku yang rasional. Contoh lain, seorang penjual dianggap rasional jika ia dapat memaksimalkan keuntungan dari usahanya. Penetapan harga yang tinggi untuk memperoleh keuntungan yang besar, oleh karenanya, dianggap wajar. Sementara jika pedagang tersebut menetapkan harga yang tidak menghasilkan keuntungan tinggi dianggap kurang wajar. Dalam hal ini rasionalitas ditentukan oleh tinggi dan rendahnya keuntungan. Jika usaha tersebut dapat menghasilkan keuntungan maksimum, maka tindakan tersebut rasional, sementara jika sebaliknya, maka tidak rasional. Dari situ, maka perilaku agen ekonomi dianggap rasional, jika ia memperoleh kepuasan atau keuntungan material yang tinggi dalam kegiatan ekonominya. Dengan kata lain, parameter rasionalitas perilaku ekonomi didasarkan pada tingginya kepuasan yang diterima untuk diri pelakunya sendiri dalam kegiatan ekonomi tersebut.

Kepentingan pribadi atau *self-interest*, menjadi titik tekan di sini. Namun, menurut Adam Smith, penekanan pada *self-interest* itu bukan berarti mengabaikan kepentingan masyarakat. Menurutnya, dengan memaksimalkan *self-interest*, kepentingan (kesejahteraan) masyarakat dengan sendirinya akan terpenuhi kesejahteraan masyarakat itu. Oleh karena itu, dalam buku-buku ekonomi, term rasionalitas ini dijelaskan bahwa pelaku ekonomi melakukan tindakan rasional jika ia melakukan sesuatu yang sesuai dengan *self-interest*, dan pada saat yang sama konsisten dengan membuat pilihan-pilihannya dengan tujuan dapat dikuantifikasikan (dihitung untung ruginya) menuju kesejahteraan umum.⁴ Meskipun ada tujuan kepentingan umumnya, tetapi itu berangkat dari kepentingan pribadi.

Sketsa Historis

Definisi ilmu ekonomi modern dengan implikasi tindakan rasionalitas di atas, tidaklah

⁴Syed Omar Syed Agil, "Rationality in Economic Theory, A Critical Appraisal", dalam *Readings in Microeconomics, An Islamic Perspective*, ed. Sayyid Taher, dkk (Malaysia: Longman, 1992), 32.

muncul secara tiba-tiba. Dalam perjalanannya, konsep tersebut dapat dilacak benang merahnya secara historis. Pada awal zaman Merkantilisme,⁵ kaum saudagar tidak didorong untuk mendapat keuntungan besar. Hal itu disebabkan karena dua hal; (1) adanya kebijakan komunitas kaum Merkantilisme yang hanya menguntungkan kelompok pedagang-pedagang besar melalui hak-hak istimewa yang bersifat monopolistik, di satu sisi, dan (2) atmosfer keagamaan yang berakar dari ajaran-ajaran Gereja Katolik yang kurang peduli dengan kesejahteraan, di sisi yang lain. Gereja Katolik menganggap kemakmuran ekonomi dan golongan orang kaya bertentangan dengan ajaran Kristus. Mereka bahkan menyatakan bahwa para pedagang akan masuk neraka.⁶ Ungkapan lain yang senada dan lebih populer saat itu "The merchant can scarcely or never be pleased to God" (Para pedagang jarang atau bahkan tidak pernah disukai Tuhan).⁷

Karena dua hal di atas, para saudagar tidak dapat leluasa mencari keuntungan yang memadai dari kegiatan ekonominya, sehingga implikasi luasnya, masyarakat berada pada standar bawah kesejahteraannya. Orientasi masyarakat berubah ketika pada kenyataan di lapangan mereka butuh kehidupan yang menyejahterakan. Dorongan ini menguat sehingga mereka menganggap bahwa kehidupan material harus diutamakan daripada moral. Seseorang dipandang berhasil jika memperoleh kekayaan material daripada kekayaan moral. Perlahan-lahan akhirnya masyarakat mulai meragukan dan meninggalkan ajaran gereja.⁸ Bersamaan dengan itu pula kaum Phisiokrasi,⁹ yang menganggap potensi tanah (hal-hal yang bersifat fisik lainnya sebagai sumber utama kesejahteraan), mendominasi kegiatan ekonomi. Pada masa itu muncul teori ekonomi "Circular Flow". Teori ini menyatakan bahwa proses produksi, tukar menukar (pemasaran) dan konsumsi merupakan faktor yang saling berhubungan yang harus dilihat keterkaitannya satu sama lain. Hubungan tersebut harus berjalan secara alami tanpa ada tekanan, monopoli atau hak-hak istimewa lainnya. Individu-individu memiliki otoritas penuh untuk melaksanakan kegiatan ekonominya.¹⁰

Pada babak selanjutnya, teori-teori ekonomi yang dirintis kaum Phisiokrasi dikembangkan lebih jauh oleh mazhab Klasik.¹¹ Teori ekonomi yang berkembang pada masa ini bermuara pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai jika individu-individu diberi kebebasan untuk mengelola kepentingannya sendiri. Setiap individu paling mengerti apa yang terbaik untuk dirinya. Tiap individu berhak untuk mencari bidang usahanya untuk menghasilkan barang atau jasa yang dikehendakinya tanpa adanya pembatasan. Setiap individu akan mengerjakan apa yang dianggapnya paling baik untuk kepentingan dirinya

⁵Tokoh terkenal mazhab ini antara lain; Thomas Mun dari (1571-1641), saudagar kaya dan anggota dewan pimpinan perusahaan Inggris, dan Jean Baptiste Colbert (1619-1683), pejabat negara, staf ahli kementerian bidang ekonomi dan keuangan Prancis.

⁶Muhammad Arif, "Toward Establishing The Microfoundations of Islamic Economics: The Basis of The Basics". Dikutip oleh Syed Omar Syed Agil, *Rationality in*, 33.

⁷Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 17.

⁸Daniel R Fusfeld, *The Age of Economists, Ideas that Shape The Way We Live* (New York: Pyramid Publication, 1972), 18.

⁹Dua tokoh terkemuka mazhab ini adalah Prancis Francois Quesnay (1694-1774), dan Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781).

¹⁰Agus Miftahus Surur, "Pasar, Negara, Manusia: Membedah Anatomi Teori Ekonomi", dalam "Harga Tuhan, Wacana Agama dalam Prilaku Ekonomi", *Jurnal Gerbang*, Vol. 5, No. 2, Oktober-Desember, 1999, 4-5.

¹¹Pelopop mazhab ini adalah Adam Smith (1723-1780).

sendiri. Untuk memenuhi tujuan itu, di pihak lain, negara harus memberlakukan pasar bebas yang dapat memunculkan persaingan secara leluasa.¹²

Dari kondisi demikian, wacana tentang kepentingan pribadi menjadi dasar bagi perilaku ekonomi masyarakat. Setidaknya pada akhir abad ke 17 M, iklim ekonomi seperti ini yang kemudian terkenal dengan sistem kapitalis, telah menjadi bagian dari masyarakat. Aspek-aspek produksi, distribusi (termasuk pemasaran), dan konsumsi tidak lepas dari tujuan kepentingan pribadi tersebut. Perilaku manusia menjadi sangat fungsional. Pada saat yang bersamaan, etika Protestan, aliran yang membuat *front* sendiri dari induknya, dirumuskan untuk mendorong dan menjustifikasi motif kepentingan pribadi itu dalam ekonomi kapitalis.¹³

Sebagai hasil dari perubahan itu, doktrin-doktrin individualis mulai mendominasi pemikiran ekonomi. Prinsip kepentingan pribadi (*self-interest*) menjadi motif perilaku ekonomi masyarakat. Perubahan itu sangat drastis. Ketika selama berabad-abad "kran" untuk mendapatkan keuntungan ditutup oleh otoritas Gereja, maka ketika itu dibuka semangat masyarakat untuk mengejar keuntungan menjadi luar biasa. Apalagi didukung oleh teori-teori ekonomi dan etika Protestan yang melegitimasi perilaku itu. Perubahan tata nilai dan pola pikir masyarakat pun ikut berubah. Atmosfer usaha telah membentuk tata nilai masyarakat menjadi sangat mementingkan diri sendiri (*egois*). Iklim kehidupan pun telah terbingkai dalam *frame* berpikir masyarakat bahwa standar rasionalitas (kebenaran) seseorang adalah ketika ia melakukan sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Faham sekularisme, memisahkan diri dari ajaran-ajaran agama (gereja) berkembang sangat luas.¹⁴ Suasana inilah yang menghantarkan masyarakat pada perdagangan bebas dan liberalisme ekonomi. Oskar Lange melukiskannya "Prinsip dari rasionalitas ekonomi menunjukkan dirinya di sini secara utuh untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan aktifitas ekonomi manusia."¹⁵ Kondisi ini terus menguat hingga sekarang ini. Melalui imperialisme dan kolonialisme faham tersebut menancap di dunia muslim.¹⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, sesungguhnya rasionalitas ekonomi itu diukur dari komitmen pelaku ekonomi dalam memegang kepentingan pribadinya. Ia dianggap tidak rasional jika tidak ada motif *self-interest* dalam perilakunya. Dalam sejarah, prinsip ini telah terbangun sejak dulu, sehingga ketika pelaku ekonomi melakukan kepentingannya sendiri tanpa peduli dengan orang lain, itu merupakan hal yang wajar, karena dari dulu terbiasa demikian. Apa yang dianggap mazhab Klasik bahwa kepentingan umum tercipta melalui pembebasan atas kepentingan-kepentingan pribadi ternyata tidak terwujud. Apalagi melihat kenyataan dunia dewasa ini, di mana gap tajam si kaya dan si miskin semakin menganga.

Dari situ pulalah dapat dibuat *blue print*, bahwa konsep ilmu ekonomi adalah merupakan perilaku-perilaku yang dibayangi oleh ideologi kapitalis yang berkarakter individualis (*egois*) atas kepentingannya, yang diwujudkan dalam pilihan-pilihannya yang dapat memaksimalkan

¹²Agus Miftahus Surur, *Pasar, Negara*, 5.

¹³Syed Omar Syed Agil, *Rationality*, 33.

¹⁴M. Hatta, "Sistem Ekonomi Neo Liberalis-Kapitalisme dalam Perspektif Nilai-nilai Etik Islam," 03/02/2007, www.e-Syariah.ORG.

¹⁵Oskar Lange, *Political Economy*, vol. 1, Pergamon Press, 1974, 158, dikutip dari Syed Omar Syed Agil, *Rationality*, 33.

¹⁶Masyhudi Muqorobin, "Landscape for The Future Islamic Economics", *Jurnal ISEFID*, vol. 3, No. 3, Desember 2004, 19.

kepuasannya dengan target-target dan siasat-siasat tertentu yang efektif dan efisien agar tidak tersaingi oleh lainnya lantaran terbatasnya sumberdaya.

Permasalahan dalam Pemberlakuan Rasionalitas

Konsep rasionalitas yang diukur dari kepentingan pribadi mengundang banyak permasalahan. Beberapa ungkapan keberatan diajukan oleh Syed Agil dalam tulisannya "Rationality in Economic Theory: A Critical Appraisal", antara lain; *pertama*, rasionalitas mempunyai watak terlalu menuntut dan membatasi. Konsep rasionalitas menuntut pelaku ekonomi untuk selalu tahu informasi. Ia dipaksa untuk mengetahui semua hal yang dapat memenuhi kepuasannya, baik cara ataupun hasilnya. Karena kepuasan itu diperoleh dari keserbatahuannya. Keserbatahuan itu merupakan tuntutan mutlak. Sementara di sisi lain, ia dibatasi oleh kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan kepuasannya yang diwujudkan dengan cara menekan emosi dan perasaannya yang meluap-luap. Ia dipaksa untuk tetap memokus pada kepentingan pribadi tersebut dengan membatasi diri dari keterlibatan dengan kepentingan-kepentingan orang lain.¹⁷ *Kedua*, rasionalitas membuat pelakunya sebagai bukan manusia aktual. Manusia menjadi tidak realistis, karena orientasinya hanya mengejar kepuasan yang seringkali di luar jangkauannya.¹⁸ *Ketiga*, rasionalitas membuat manusia menjadi terlalu materialistik. Ini karena semuanya diukur dengan benda. Implikasinya adalah segala yang tidak nampak seperti; perasaan, empati, jiwa kesederhanaan, kasih sayang, cinta dan lain-lain kurang diperhatikan.¹⁹

Permasalahan lain dari pemberlakuan rasionalitas ekonomi adalah memberikan rekomendasi untuk meninggalkan komitmen-komitmen kerjasama dengan pelaku ekonomi lain (berkhianat). Kecenderungan ini menjadi konsekuensi atas pemeliharaan *self-interest* dalam diri setiap pelaku ekonomi. Karena dengan mengabaikan komitmen kerjasama ekonomi seseorang memperoleh keuntungan besar dari lainnya. Dalam sebuah teori permainan (*game theory*) *Prisoner's Dilemma* (Dilema Orang Tahanan), motif pelaku ekonomi dapat tergambar dengan jelas.

	Tahanan A bekerjasama dengan B	Tahanan A tidak bekerjasama dengan B
Tahanan B bekerjasama dengan A	A dihukum 1 tahun B dihukum 1 tahun	Tahanan A dibebaskan Tahanan B ditahan 3 tahun
Tahanan B tidak bekerjasama dengan A	Tahanan B dibebaskan Tahanan A ditahan 3 tahun	Tahanan A dan B ditahan masing-masing 2 tahun

Ilustrasi di atas, memberikan pemahaman bahwa tidak bekerjasama lebih menguntungkan daripada bekerjasama. Sementara bekerjasama dengan cara memegang komitmen untuk tidak mengakui perbuatan jahat, tidak menguntungkan. *Self-interest* akan menggiring mereka untuk melanggar komitmen, karena di dalamnya terkandung keuntungan.²⁰

¹⁷ Ibid., 34.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., 38.

²⁰Teori ini diungkap oleh Robert Axelrod dalam bukunya "The Evolution of Cooperation" (1984), <http://>

Dalam hal tertentu, konsep rasionalitas ekonomi terbangun oleh tidak adanya dikhotomi antara *raghbah* (keinginan) dan *hajah* (kebutuhan). Rasionalitas cenderung mengumbar *raghbah* daripada *hajah*. Rasionalitas terbangun dari keyakinan bahwa *scarcity* (kelangkaan) sumberdaya menuntut sikap rasional individu untuk memaksimalkan kepuasannya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa yang dipenuhi untuk kepuasannya oleh pelaku ekonomi adalah keinginannya (*raghbah, want*), bukan kebutuhannya (*hajah, need*). Keinginan manusia cenderung kurang. Ketika seseorang bekerja untuk menanggung kehidupannya, ia mungkin dapat memenuhi kebutuhannya, tapi tidak cukup untuk memuaskan keinginannya.²¹ Pendek kata, ketidakcukupan seseorang untuk memenuhi keinginan tersebut terus dirangsang untuk bisa memenuhinya secara maksimal. Dan ketika dia tidak bisa melakukannya, maka dia telah melakukan tindakan tidak rasional.

Beberapa permasalahan yang muncul dari konsep rasionalitas di atas tentu saja, jika dibiarkan, dapat mengakibatkan ancaman serius dalam kehidupan masyarakat. Apa yang kata Adam Smith bahwa kesejahteraan masyarakat tercipta dengan sendirinya lantaran tiap individu mengejar kepentingannya sendiri, dapat menghasilkan sebaliknya, kepentingan masyarakat menjadi hancur karena kerakusan individu dalam berperilaku ekonominya.

Pada realita di lapangan dapat dilihat, banyak pengusaha yang menjadi pemangsa (predator) bagi pengusaha lain. Dengan berorientasi pada keuntungan semata, mereka melakukan apa saja tanpa peduli dengan nasib orang lain, karyawan dan pegawainya, juga masyarakat konsumen yang membeli produknya, serta lingkungan alam sekitarnya. Prinsip mereka, menurut Thorstein Bunde Veblen (1857-1929) dalam bukunya "The Theory of Business Enterprise", bukan lagi menggunakan prinsip *production for use*, menghasilkan barang dan jasa yang disukai konsumen, tetapi *production for profit*, menghasilkan keuntungan saja, sehingga mereka seringkali mengabaikan cara yang digunakannya.²²

Demikian juga perilaku konsumsi masyarakat, menurut Veblen dalam bukunya *The Theory of The Leisure Class*, masyarakat sekarang senang berlomba-lomba membeli barang-barang mewah yang digunakan untuk pamer, tidak peduli apakah barang tersebut berguna atau tidak dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh dari barang-barang itu bukan diperoleh dari pengkonsumsianya tetapi lewat dampaknya terhadap orang lain. Makin membuat kagum orang lain atas barang itu, makin tinggi kepuasannya. Perilaku ini disebutnya sebagai "conspicuous consumption", yaitu konsumsi barang-barang dan jasa yang bersifat *ostentatious* (pamer, melagak), yang dimaksudkan membuat orang kagum. Dalam ungkapannya "conspicuous consumption of valuable goods is a means of reputability to gentlemen of leisure".²³

Analisis Veblen tersebut berbanding terbalik dengan prinsip yang ada dalam aliran Klasik dan neo-Klasik yang mengatakan bahwa orang akan selalu memilih alternatif konsumsi terbaik untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Perilaku tersebut juga bertentangan dengan anggapan kaum klasik bahwa tiap keputusan konsumen didasarkan pada rasio bukan emosi.

www.infoturkish.com/Turkey/Prisoners-dilemma.html. Untuk melihat lebih jelas bagaimana teori ini dipraktikkan. Lihat Manuel G. Velasquez, *Business Ethics, Concepts and Cases* (New Jersey: Prentice-Hall, 1998), 40-43.

²¹Zubair Hasan, *Introduction*, 1.

²² Veblen dalam Deliarnov, *Perkembangan*, 141-142.

²³Ibid., 147.

Dari situ dapat ditarik satu pemahaman bahwa perilaku rasionalitas dengan mengasaskan pada *self-interest*, dewasa ini justru memunculkan persoalan serius di masyarakat. Apa yang terjadi di lapangan terkait ketimpangan status ekonomi miskin-kaya, kelangkaan sumber daya alam, dan rusaknya keseimbangan alam dapat dialamatkan kepada konsep rasionalitas yang dibangun sistem kapitalis. Karena pemberlakuan rasionalitas ekonomi ini telah membawa masyarakat pada ketidakstabilan.

Kalangan produsen dipacu untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya dengan meminimalisasi modal. Demikian juga golongan konsumen dipacu untuk dapat memaksimalkan kepuasannya terhadap barang. Kehidupan diciptakan menjadi kondisi di mana seseorang dapat menggunakan logikanya sendiri untuk meraih keuntungan hidup. Peradaban dibangun untuk melahirkan manusia-manusia yang berorientasi pada kepentingannya sendiri dan sekaligus mengalienasi sendiri dari kepentingan-kepentingan orang lain. Kenyataan ini terjadi tentu tidak dalam waktu singkat, tapi telah berlangsung ratusan tahun, sehingga tanpa terasa ideologi kapitalis mengkristal menjadi kepribadian manusia modern. Pola pikir, perilaku dan tata nilai masyarakat menjadi sangat individual dan materialistik. Dimensi individualisme kapitalis membangun kehidupan masyarakat menjadi sangat *private*, kurang memikirkan kepentingan orang lain. Paradigma materialisme kapitalis berhasil mengkonstruksi jati diri masyarakat menjadi sangat mencintai benda, berorientasi pada fisik dan lahir, realitas yang nampak secara kasat, bukannya makna, ruh, dan realitas sejati yang ada di balik benda itu. Dalam kehidupan nyata dapat dilihat, pola pikir rasionalisme kapitalisme ini menuhankan akal sebagai satu-satunya pencari hakikat kebenaran. Sedangkan tata nilai masyarakat berorientasi pada penguasaan atas sumber-sumber produksi. Indikasi hal tersebut nampak pada ketimpangan hidup yang tajam antara golongan kaya dan miskin.

Masjajah: Sebuah Orientasi Ekonomi

Ilmu ekonomi modern yang dikembangkan Barat telah banyak mengundang gugatan dewasa ini. Sal Restivo, misalnya, dalam bukunya "Modern Science and Social Problem" menyatakan bahwa nilai-nilai yang membangun keilmuan modern, termasuk ekonomi, lahir dari sistem sosial yang cacat. Ia diciptakan sebagai mesin eksploitasi sistem kapitalisme. Kandungan ilmu-ilmu tersebut tak lain hanyalah nilai-nilai yang kontradiktif dengan prinsip demokrasi, kualitas hidup manusia dan juga kelangsungan hidup bumi dan isinya.²⁴ Dalam kesempatan berbeda, Mahathir Muhammad juga pernah menyimpulkan atas fenomena globalisasi yang tidak pernah berhenti didengung-dengungkan Barat, *There is no single interpretation of globalization*, katanya.²⁵

Apa yang dimaksud Restivo dengan sistem sosial yang cacat tak lain adalah dunia Barat yang mengukur segalanya dengan keuntungan material dan dilakukan oleh individu-individu yang mementingkan diri sendiri. Kering dari nuansa spiritual, tatanan moral, dan fenomena kejiwaan,²⁶ sehingga yang ada hanyalah benda, akal, untung dan kepentingan.

²⁴Sal Restivo, "Modern Science as a Social Problem", diambil dari Sulfikar Amir, *Sain, Islam dan Revolusi Ilmiah*. Tulisan dari internet, tanpa alamat.

²⁵ Dikutip dari makalah Adi Nugroho, "Globalisasi dan Demokrasi Otoriter," dalam Reuni IKA-Suka Yogyakarta 2005, 3-4.

²⁶ Isma'il R al-Faruqi, "Mengislamkan Ilmu-ilmu Sosial", dalam Abubaker A Bagader (ed.), *Islamisasi Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: PLP2M, 1985), 8-9.

Rasio diukur oleh hal-hal yang kasat mata. Dengan itu pada akhirnya, sistem keilmuan menjadi sarat dengan kepentingan, untung rugi material, dan alat pelestari kekuasaan. Bukti kongkritnya, adalah ilmu ekonomi modern yang pada banyak hal lebih menguntungkan golongan kaya dan bertentangan dengan kepentingan manusia secara umum. Globalisasi, sebagai *icon* perdagangan modern yang dianggap dapat membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha dari negara berkembang untuk ikut berpartisipasi, ternyata lebih banyak bermuatan kepentingan atas pengusaha-pengusaha negara-negara maju untuk melebarkan wilayah pasarnya, yang di negaranya sudah tidak direspon secara memadai. Globalisasi terlalu kasat mata untuk menjadi sebuah siasat Barat, karena pada kesempatan lain, globalisasi tidak memberikan peluang bagi para buruh untuk leluasa bekerja di negara-negara maju. Oleh karena itu, Mahathir Muhammad mengatakan bahwa apa yang didefinisikan oleh Barat tentang globalisasi itu adalah penafsiran tunggal yang memaksa untuk tidak bisa ditafsirkan dengan makna lain. Adalah sebuah pemaksaan kepentingan untuk kemudian tidak menerima kepentingan-kepentingan lain yang tidak Barat inginkan.²⁷

Keilmuan Barat yang dibangun dengan mengabaikan nuansa spiritual, tatanan moral, dan fenomena kejiwaan, menurut al-Faruqi, dianggap sebagai kesalahan vital dalam sebuah bangunan sistem keilmuan. Data-data apriori tersebut bagian dari realita yang tidak mungkin dihilangkan dan berpisah dengan kehidupan manusia.²⁸ Model bangunan demikian diaplikasikan kepada semua jenis keilmuan, termasuk ekonomi. Oleh karena itu, lanjutnya, apa yang dianggap keilmuan rasional menurut Barat, sesungguhnya rasional yang skeptis. Rasionalitas ilmu ekonomi sebagai bagian kecil teori ekonomi yang ada dalam sistem ilmu tersebut juga bersifat skeptis.

George Soros dalam bukunya *Open Society, Reforming Global Capitalism*, juga mengungkapkan kritik tajamnya terhadap kapitalisme global yang sekarang berkembang. Menurutnya, prinsip kapitalisme yang didasarkan pada *laissez-faire* telah menciptakan ekonomi sebagai sebuah sistem persaingan bukan kerjasama. Dengan ini maka muncul "siapa kuat siapa menang" dan "yang menang mengambil semuanya". Demikian juga filsafat individualisme yang menjadi fondasi kapitalisme, menurutnya, harus dibenahi. Individualisme ini telah terang-terangan tidak berpihak pada kepentingan umum. Dan ini yang terjadi di lapangan. Apa yang diteorisasikan oleh aliran Klasik dan neo-Klasik bahwa jika setiap individu bekerja untuk mengejar kepentingannya sendiri, maka secara otomatis akan dicapai kebaikan masyarakat secara keseluruhan melalui tercapainya keseimbangan, menurutnya, tidak sesuai dengan realitas. Yang terjadi adalah kemiskinan, kepincangan dan kerusakan lingkungan hidup. Kritik Soros terhadap kapitalisme memang menarik, karena ia sendiri seorang kapitalis. Soros juga mengakui bahwa kebenaran itu tidak bisa dicapai oleh manusia karena keterbatasannya.²⁹

Gugatan terhadap sistem kapitalisme, sebagaimana diungkap di atas sesungguhnya bermuara pada ketidakmampuan sistem ini menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu faktor yang membuat kesulitan menciptakan

²⁷ Adi Nugroho, *Globalisasi*, 3.

²⁸ Isma'il R al-Faruqi, " *Mengislamkan*, 8.

²⁹ George Soros, *Open Society, Reforming Global Capitalism*, terj. Sri Kusdiantiyah (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), xxxii-xxxv.

kondisi itu adalah karena kegiatan ekonomi yang luas diukur dengan standar kebenaran (rasio) individu. Padahal setiap orang memiliki takaran rasionalitas berbeda. Kalau kemudian Soros menawarkan masyarakat terbuka, maka pertanyaannya bagaimana menciptakan masyarakat terbuka itu. Jika saja orientasi pelaku ekonomi tetap didasarkan pada rasionalitas yang diukur atas kebenaran individu baik dalam konteks domestik-keluarga ataupun publik-masyarakat, maka tetap saja masyarakat akan “sikut-sikutan”. Masyarakat terbuka memang sebuah idealitas yang mungkin menurut saya sebagai kondisi yang tepat untuk dewasa ini. Tetapi bagaimana mengkonstruksinya?

Kuncinya adalah *masalah*. *Masalah* adalah sesuatu yang baik, bukan saja untuk pelaku tetapi juga orang lain. Oleh karena itu *masalah* merupakan sebuah kepentingan juga. *Masalah*, perlu dipetakan dulu kandungan kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya, yaitu: kepentingan pribadi, masyarakat, negara atau umat manusia. Kepentingan pribadi atau *self-interest*, harus diakui, khususnya ketika kepentingan tersebut hanya dalam wilayah domestik (keluarga). Terhadap kepentingan pribadi ini, Islam juga merekomendasi. Pengakuan tersebut sebagai konsekuensi atas ciptaan Tuhan yang berupa nafsu. Dari nafsu ini muncul keinginan manusia untuk berkembang, berubah, dan melakukan metamorfosis menuju derajat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, keinginan itu sebenarnya *instink* dasar manusia hidup. Dalam al-Qur’ān pengakuan Islam atas naluri tersebut dinyatakan bahwa manusia memang dihiasi kecintaan terhadap perempuan-perempuan, anak-anak, kekayaan emas, perak, dan sebagainya. Ini menunjukkan al-Qur’ān mengakui akan hal itu. Dalam sebuah Hadith juga disebutkan bahwa watak manusia itu selalu kurang, jika ada dua danau yang berisi harta benda, manusia menginginkan tiga danau. Ini juga sebuah bukti bahwa manusia memiliki naluri (*instink*) mencintai harta. Oleh karena itu, wajar jika kepentingan-kepentingan pribadi cenderung selalu diutamakan dalam setiap aktivitas kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Dengan kata lain, kepentingan manusia untuk memprioritaskan diri sendiri itu tidak dilarang dalam agama. Melalui hal itu, sesungguhnya agama mengisyaratkan agar manusia bisa memiliki dinamika hidup yang lebih variatif. Ketika itu tidak dilarang agama dan mempunyai tujuan baik, maka itu termasuk *masalah*, lebih tepatnya kemaslahatan pribadi. Dalam kasus ekonomi, misalnya, ketika seseorang penjahit membuat bajunya sendiri, anaknya dan istrinya. Ini termasuk *instink* manusia untuk bisa menghemat uang. Dan sikap ini sebuah kemaslahatan walaupun untuk dirinya. Islam terlalu realistis untuk mengabaikan bahwa manusia itu pada dasarnya egoistik. Pada poin inilah sesungguhnya yang kurang digali lebih dalam terkait perilaku rasional ekonomi dalam perspektif Islam.

Dalam konteks pergaulan ekonomi, naluri egoistis ini juga muncul, sehingga rawan berbenturan dengan egoistis orang lain. Sepanjang benturan itu tidak mengakibatkan kerugian orang lain masih bisa dimaklumi. Pada koridor itu *masalah* kemasyarakatan ditetapkan. Artinya, interaksi ekonomi itu terjadi secara seimbang, tidak ada yang terlalu dirugikan dan tidak ada yang terlalu diuntungkan. Dari situ konsep *‘an tarad* diberlakukan. Dalam lingkup kecil, asal penjual menetapkan harga sewajarnya (tidak terlalu mahal atau murah), baik pembeli tahu ataupun tidak tahu, maka itu *masalah*. Demikian juga seorang konsumen, asal tidak membuat dia menjadi susah (masalah) setelah mengkonsumsi, maka itu juga *masalah*. Apa yang digagas oleh para pemikir Islam kaitan dengan perilaku ekonomi dalam konteks ini cenderung menekankan pada unsur sosialnya. Walaupun tidak salah, tetapi

menitikberatkan terlalu banyak kepada *Islamic man* sebagai insan yang lebih memiliki sifat mementingkan orang lain dan memiliki kesadaran sosial tinggi daripada dirinya, terlalu sangat berlebihan (untuk tidak mengatakannya kurang realistis). Kemaslahatan di sini berangkat dari sikap jujur, terbuka, dan kepentingan bersama. Sepanjang manusia melakukan tindakan itu, maka benturan-benturan kepentingan dapat diminimalisir. Artinya, sepanjang sifat egoisme itu dibarengi dengan sikap-sikap itu, maka konflik kepentingan tereduksi. Di sisi lain, peran pemerintah untuk mengintervensi pasar juga perlu dilakukan. Tindakan ini hanya jika dibutuhkan dalam penanganan-penanganan kasus-kasus kepentingan yang tidak bisa diatasi

Demikian kemaslahatan terus berkembang secara meluas. Artinya, semakin kemaslahatan itu memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada pelaku dan orang banyak, masyarakat, wilayah, atau sampai kehidupan manusia secara keseluruhan, maka, menurut penulis, itulah kemaslahatan yang dikehendaki oleh shari'ah Islam. Hal ini bukan berarti kemaslahatan individu atau masyarakat tidak sesuai shari'ah. Kemaslahatan bersifat mengembang. Dan setiap titik yang terlampaui oleh kemaslahatan, itulah kemaslahatan juga. Mungkin lebih tepatnya kemaslahatan sementara. Sebab kemaslahatan sesungguhnya adalah kemaslahatan yang bisa menjangkau semua kehidupan manusia. Itulah kemaslahatan sejati. Dan mungkin inilah yang dimaksud oleh al-Faruqi sebagai ketauhidan universal (*the unity of humanity*), di mana kehidupan manusia dalam berbagai bentuk ras, warna kulit, bentuk tubuh, kepribadian, ragam bahasa dan budaya menyatu dalam satu nilai-nilai ontologis ketuhanan.³⁰ Penyatuan tersebut secara detail, menurut Naqvi, masuk dalam wilayah politik, ekonomi, sosial, dan agama, di mana kehidupan manusia ditransformasikan dalam kehidupan kemanusiaan secara menyeluruh dengan konsisten dan terintegrasi dengan alam tanpa pembeda. Dengan itu manusia mencapai harmonitas melalui munculnya rasa memiliki persaudaraan universal.³¹

Konsep di atas tentu berbeda dengan teori rasionalitas ekonomi konvensional. Perbedaannya adalah (1) kepentingan pribadi didasarkan pada kecintaannya terhadap materi yang dianggapnya satu-satunya pemuas kehidupan, (2) egoisme yang didasarkan pada materialisme terlalu kaku untuk bisa bersikap jujur, adil dan terbuka, (3) sikap altruistik diwujudkan hanya untuk kepentingan material semata, di mana itu bagian dari siasat jangka panjang untuk menunggu kepuasan yang lebih besar, (4) kepuasan diukur secara berlebihan, sehingga seringkali membuat tidak sadar akan keterbatasan-keterbatasan pelakunya, dan (5) terbatasnya intervensi negara dalam pasar ekonomi menjadikan iklim ekonomi riskan mengundang konflik.

Konsep rasionalitas perilaku ekonomi konvensional dalam konteks kehidupan antar masyarakat sulit diukur signifikansinya, mengingat setiap orang dapat melakukan tindakan-tindakan rasional. Makna rasionalitas tidak ada batasan, apakah untuk pelakunya atau masyarakatnya. Seringkali tindakan rasional seseorang tidak sama dengan tindakan rasional orang lain.

Dalam wacana filsafat, khususnya pembicaraan mengenai kebenaran, sering muncul

³⁰Isma'il Raji al-Faruqi, *Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan* (Maryland: IIIT, 1982), 33.

³¹Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society* (London and New York: Kegan Paul International, 1994), 26.

istilah kebenaran subyektif dan kebenaran obyektif. Kebenaran subyektif adalah kebenaran yang diperoleh dari hasil pemikiran sendiri yang diyakini secara individual sebagai sesuatu yang benar atau sesuai dengan standar nilai dalam dirinya sendiri. Sedangkan kebenaran obyektif merupakan kebenaran yang muncul bukan saja karena dirinya menganggap benar tetapi orang lain juga mengatakannya sebagai benar.

Term rasionalitas, oleh karenanya, dapat diklasifikasikan sebagaimana di atas, rasionalitas subyektif dan rasionalitas obyektif. Rasionalitas subyektif dimaksudkan sebagai tindakan individual yang dianggap masuk akal (dapat dimaklumi atau benar) lantaran memenuhi parameter kewajaran dirinya sendiri. Sedangkan rasionalitas obyektif merupakan kewajaran logis yang tidak saja disepakati oleh pelaku secara pribadi tetapi juga oleh orang banyak.

Apa yang diwacanakan oleh ekonomi konvensional tentang rasionalitas ekonomi yang cenderung mengusung kepentingan pribadi menjadi sangat subyektif. Karena tindakan rasional berorientasi pada akal atau cara pikir manusia, maka sangat tergantung pada motivasi, kultur, tradisi, pengalaman dan tingkat pengetahuan seseorang.

Secara lebih rinci, perbedaan makna rasionalitas bukan hanya antar perorangan (rasionalitas subyektif), tetapi juga antar masyarakat atau komunitas dengan tradisinya masing-masing (rasionalitas obyektif). Rasional subyektif menjadi tidak obyektif jika tidak seirama dengan masyarakat atau komunitas. Demikian juga rasionalitas obyektif masyarakat menjadi tidak obyektif ketika tidak sesuai dengan komunitas masyarakat yang lebih besar. Demikian seterusnya sampai meluas ke wilayah kemanusiaan yang ada di bumi. Namun tetap saja tidak ditemukan rasionalitas obyektif itu. Oleh karena itu, memberlakukan makna rasionalitas secara aplikatif kepada semua orang menjadi sangat kacau.

Makna rasionalitas sesungguhnya tidak ditemukan kesepakatan baik pada tataran obyektif, apalagi subyektif. Maka yang lebih penting di sini adalah bagaimana rasionalitas itu dipahami tidak saja oleh individu secara subyektif tetapi juga masyarakat. Dan pengukuran kesesuaian dengan masyarakat atau obyektifikasi dari rasionalitas subyektif itu berupa kemaslahatan. Karena kemaslahatan menjadi nilai umum yang disepakati. Artinya tidak ada orang yang tidak sependapat dengan kemaslahatan walaupun itu dilakukan secara subyektif individual.

Beberapa pertimbangan Islam merumuskan perilaku ekonomi didasarkan pada nilai kemaslahatan, antara lain:

- a. Shari'ah mengandung kemaslahatan yang bersifat universal dan abadi. Ditetapkannya shari'ah karena untuk tujuan kemaslahatan itu sendiri, yang diwujudkan melalui perlindungan keimanan (agama), jiwa, akal, keturunan dan harta, demikian menurut al-Ghazali.³² Lebih lanjut, al-Shatibi³³ menguraikan kemaslahatan ditegakkan untuk kehidupan dunia secara keseluruhan. Dan adanya kehidupan dunia karena adanya akhirat. Kemaslahatan dunia akan membawa pada kemaslahatan akhirat.³³ Kemaslahatan meliputi: *ḍaruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniah* (*kamaliyyah*). Kemaslahatan *ḍaruriyah* dibangun atas dasar terpenuhinya kemaslahatan.³⁴ Lebih tegas Ibn Qayyim al-Jawziyah menyatakan: "dasar

³²al-Ghazali, *al-Mustashfa* (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1937), 139-140.

³³al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, juz II, tahqiq Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid (Kairo: Matba'ah al-Madani, 1969), 16.

³⁴Ibid., 4-5.

- shari'ah adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, belas kasihan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang sempurna. Apapun yang menyimpang dari keadilan pada penindasan, dari belas kasihan pada kekerasan, dari kesejahteraan pada kemiskinan dan dari kebijaksanaan pada kebodohan, adalah sama sekali tidak ada kaitannya dengan shari'ah."³⁵
- b. Dalam situasi apapun dan dalam posisi di manapun kemaslahatan shari'ah dapat dijangkau. Kadang manusia tidak mengerti kemaslahatan itu. Manusia sering menganggap bahwa shari'ah tidak kontekstual dengan kehidupan modern. Anggapan ini muncul karena, kemaslahatan kadang tidak nampak dalam pikiran manusia. Apa yang dianggap *masalah* pada hari ini, belum tentu *masalah* pada waktu yang akan datang. Demikian juga apa yang mungkin dianggap tidak kontekstual pada saat ini, bisa jadi mengandung manfaat pada waktu setelahnya. Tetapi apa yang *masalah* hari ini belum tentu kemaslahatan sejati yang dimaksudkan Tuhan. Tetapi hal itu bukan berarti kesia-siaan, sebab *masalah* sejati ataupun *masalah* empiris (sementara), sesungguhnya juga bagian dari maksud Tuhan.
 - c. Peran akal dalam kaitannya dengan kemaslahatan ini adalah mencari, merumuskan dan menciptakan *masalah* sebatas yang bisa dilakukannya. Demikian, perlu ada beberapa pertimbangan dari situasi, kondisi, dan budaya masyarakat yang melingkupinya. Jika kemudian ditemukan *masalah* yang dapat menciptakan kedamaian komunitas tertentu dan tidak sesuai dengan standar ukuran kedamaian komunitas lain, maka perlu dilihat sesuai dengan nilai-nilai shari'ah tidak. Jika kemaslahatan dibangun dari sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma shari'ah, hal itu bukan kemaslahatan, atau kemaslahatan artifisial.
 - d. Kemaslahatan pribadi bisa ditolerir sepanjang tidak bertentangan dengan shari'ah dan sesuai dengan kemanfaatan dirinya. Sementara kemaslahatan masyarakat harus dirasionalkan melalui *rembuk bareng* dengan individu-individu lain atau masyarakat. Fungsi rasio adalah sebagai sarana untuk mempertemukan, merumuskan, mencari dan menganalisis kemaslahatan.
 - e. Kemaslahatan sejati adalah kemaslahatan yang terjadi ketika seluruh manusia menyatu dalam ketauhidan (*unity*). Dalam bahasa al-Faruqi, diistilahkan dengan *unity of truth and unity of knowledge*. Perumusan kemaslahatan di mana akal menjadi sarana perwujudan dan *shura* menjadi mekanismenya termasuk dalam standar penentuan kebenaran dan pengetahuan.³⁶

Penutup

Rasionalitas ekonomi yang sekarang ada (kapitalis) sangat mengundang masalah serius di masyarakat. Karena dengan menekankan pada kepentingan pribadi semata dalam mengukur rasionalitas rawan berbenturan dengan pelaku ekonomi lain. Rasionalitas mempunyai standarnya sendiri-sendiri dalam tiap individu di masyarakat.

Sementara *masalah* dapat merangkum semua rasionalitas setiap individu. Sebab *masalah* dibangun tidak saja untuk kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan masyarakat

³⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *'Ilam al-Muwaqqi'in* (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra>1955), 14.

³⁶ Isma'il Raji al-Faruqi, *Islamization*, 26-27.

secara bersama-sama. Tidak ada orang yang tidak sepakat dengan perbaikan, kesejahteraan dan keadilan yang menjadi lapangan bagi *maslahah*, karena semuanya membutuhkannya.

Maslahah dalam Islam menjadi tujuan utama. Konsep *maslahah* dalam Islam ini merupakan tawaran yang lumayan solutif. *Maslahah* memberikan pemihakannya tidak saja pada individu, tetapi juga kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dengan berorientasi pada *maslahah*, kehidupan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang mempunyai implikasi jauh, tidak saja dalam konteks materil-duniawi, tetapi juga spiritual-ukhrawi.

Daftar Rujukan

- Agil, Syed Omar Syed. "Rationality in Economic Theory, A Critical Appraisal", dalam *Readings in Microeconomics, An Islamic Perspective*, Sayyid Taher, dkk (editor). Malaysia: Longman, 1992.
- Ahmad, Khurshid (ed). *Studies in Islamic Economics*. Leicester: Islamic Foundation, 1981.
- Anwar, Syamsul. "Menggagas Paradigma Epitemologi Keilmuan Fakultas Syari'ah dalam Bingkai UIN". Makalah, Seminar Sehari Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hotel Saphir, 26 Maret 2005.
- Amir, Sulfikar. *Sain, Islam dan Revolusi Ilmiah*, tulisan dari internet, tanpa alamat.
- Ahmed, Habib (ed). *Theoretical Foundations of Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Development Bank (IDB) and Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2002.
- Arif, Muhammad. "Toward Establishing The Microfoundations of Islamic Economics: The Basis of The Basics", dalam Agil, Syed Omar Syed, "Rationality in Economic Theory, A Critical Appraisal", dalam *Readings in Microeconomics, An Islamic Perspective*, Sayyid Taher, dkk (editor). Malaysia: Longman, 1992.
- Asy'arie, Musa. *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*. Yogyakarta: Lesfi, 1999.
- Axelrod, Robert. "The Evolution of Cooperation" (1984), <http://www.infoturkish.com/Turkey/Prisoners-dilemma.html>.
- Badroen, Faisal, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- al-Faruqi, Isma'il Raji. *Islamization Knowledge: General Principles and Workplan*. Maryland: International Institute of Islamic Thought, 1982.
- . "Mengislamkan Ilmu-ilmu Sosial", dalam Abubaker A Bagader (ed.) *Islamisasi Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Fusfeld, Daniel R. *The Age of Economists, Ideas that Shape The Way We Live*. New York: Pyramid Publication, 1972.
- Ghanim, Husein. *al-Iqtisad al-Islami > Tabi'atuh wa Majalatuh*. Kairo: Da' al-Wafa' li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi' cet ke 1, 1991.
- al-Ghazali > Muhammad Abu-Hamid. *al-Mustashfa' >* Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra > 1937.
- Haneef, Mohamed Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Analisis Komparatif Terpilih*, Suherman Rosyidi (terj). Surabaya: Airlangga University Press, Cet. I, 2006.
- Hasan, Zubair. *Introduction to Microeconomics, An Islamic Perspective*. Malaysia: Prentice Hall,

- Cet. I, 2006.
- Hatta, M. "Sistem Ekonomi Neo Liberalis-Kapitalisme dalam Perspektif Nilai-Nilai Etik Islam." 03/02/2007, www.e-Syariah.ORG
- Hornby, AS. *Oxford Adanced Learner's Dictionary of Current English*. Edisi IV. Inggris: Oxford University Press, 1989.
- Husaini, Adian. *Wajah Peradaban Barat dari hegemoni kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- al-Jawziah, Ibn Qayyim. *'Ilam al-Muwaqqi'in*. Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, vol 3, 1955.
- al-Junaid, Syed Abdul Hamid. "Factors of Production and Factor Pricing from An Islamic Perspective", dalam *Readings in Microeconomics, An Islamic Perspective*, Sayyid Taher, dkk (editor). Malaysia: Longman, 1992.
- Khan, M. Fahim. *Essays in Islamic Economics*. Leicester: Islamic Foundation, 1995.
- . "Fiqh Foundations of The Theory of Islamic Economics, A Survey of Selected Contemporary Writings on Economics Relevant Subjects of Fiqh," dalam *Theoretical Foundations of Islamic Economics*, Habib Ahmed (editor). Jeddah: Islamic Development Bank (IDB) and Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2002.
- Kahf, Monzer. "A Contribution to The Theory of The Consumer Behaviour in An Islamic Society", dalam *Studies in Islamic Economics*, Khurshid Ahmad (ed). Leicester: Islamic Foundation, 1981.
- . "The Theory of Consumption," dalam *Readings in Microeconomics, An Islamic Perspective*, Sayyid Taher, dkk (ed). Malaysia: Longman, 1992, 61.
- Lange, Oskar. *Political Economy*." Vol. 1, Pergamon Press, 1974.
- Mannan, M. Abdul. "The Making of An Islamic Economic Society," dalam Mohamed Aslam Haneef. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Analisis Komparatif Terpilih*, Suherman Rosyidi (terj). Surabaya: Airlangga University Press, Cet. I, 2006, 18-19.
- . *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Tim IKAPI (terj). Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, Cetakan Pertama, 1997.
- Mubyarto. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/artikel_4.htm.
- . "Penerapan Ajaran Ekonomi Islam di Indonesia." Makalah untuk Shari'ah Economics Days, Forum Studi Islam Senat Mahasiswa FE-UI, Jakarta, 19 Februari 2002.
- Muqorobin, Masyhudi. "Landscape for The Future Islamic Economics." Jurnal ISEFID, Vol. 3, No. 3, Desember 2004.
- . "Methodology of Economics: A Comparative Study Between Islam and Conventional Perspective." JESP.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Islam, Economics, and Society*. London and New York: Kegan Paul International, 1994.
- Nugroho, Adi. "Globalisasi dan Demokrasi Otoriter", dalam Reuni IKA-Suka Yogyakarta 2005.
- Rahardjo, M. Dawan. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), cetakan pertama, 1999.
- Restivo, Sal. "Modern Science as a Social Problem", diambil dari Sulfikar Amir. *Sain, Islam*

- dan Revolusi Ilmiah*. Tulisan dari internet, tanpa alamat.
- Sadr, M. Baqir. "Iqtisaduna," dalam Mohamed Aslam Haneef. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Analisis Komparatif Terpilih*, Suherman Rosyidi (terj). Surabaya: Airlangga University Press, cet. I, 2006.
- al-Shatibi. *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, tahqiq Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid, Juz II. Kairo: Matba'ah al-Madani, 1969.
- Shiddiqi, M. Nejatullah. *History of Islamic Economic Thought*. London: Mansell, 1992.
- Surur, Agus Miftahus. "Pasar, Negara, Manusia: Membedah Anatomi Teori Ekonomi", dalam "Harga Tuhan, Wacana Agama dalam Prilaku Ekonomi", *Jurnal Gerbang*, Vol. 5, No. 2, Oktober-Desember, 1999.
- Text Book Ekonomi Islam*. Disusun atas Kerjasama Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Indonesia (P3EI-UII) dengan Bank Indonesia, 2007.
- Velasquez, Manuel G. *Business Ethics, Concepts and Cases*. New Jersey: Prentice-Hall, 1998.
- Zarqa', M. Anas. *Islamization of Economics: Concept and Methodology*. J.KAU: Islamic Economics, Vol. 16, No. 1, (1424/2003).
- _____. "Methodology of Islamic Economics," dalam *Lectures on Islamic Economics*, Ausaf Ahmad dkk (ed). Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1992.